

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Sella Rachmawi, Rini, Yessi Fitri

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

rini@uinjkt.ac.id

Abstract

This study aims to examine the factors that affect the timeliness of financial reporting of local government in Indonesia. These factors are divided into two major lines: factors relating to local government and politics, also the content of financial statements and managerial competence factor. Factors associated with local government and politics proxied by local independence, regional location and the election of regional heads back. Factors associated with the content of financial statements and managerial competence proxied by position and financial performance areas, audit opinion and audit findings. Samples of this study used the whole autonomous region which issued local government financial reports and audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia as much as 524 of the total 542 local governments. They were obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia. Testing the hypothesis in this study used binary logistic regression. Results of this research reveals that local government and political factors that proxied by self-reliance, the regional location statistically affect the timeliness of financial reporting area in fiscal year 2013. Based on the results of logistic regression (logistic regression) showed that the factor content of the financial statements and managerial competence of government area proxied by the audit opinion and auditor's findings are statistically affect the timeliness of financial reporting area in fiscal year 2013.

Keywords: *Timeliness, independence, regional location, the election of return, financial position, financial performance, opinions, findings, local government financial reports.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua garis besar yaitu faktor yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan politik, serta faktor kandungan laporan keuangan dan kompetensi manajerial. Faktor yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan politik diproksikan dengan kemandirian daerah, lokasi daerah dan keterpilihan kembali kepala daerah. Faktor yang terkait dengan kompetensi manajerial diproksikan dengan posisi dan performa keuangan daerah, opini audit serta temuan audit. Sampel penelitian ini menggunakan seluruh daerah otonom yang mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan diaudit oleh BPK sebanyak 524 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPK. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik biner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor daerah dan politik yang diproksikan oleh kemandirian, lokasi daerah secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor kandungan laporan keuangan dan kompetensi manajerial pemerintah daerah yang diproksikan oleh opini audit serta temuan auditor secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013.

Kata kunci: *ketepatan waktu, kemandirian, lokasi daerah, keterpilihan kembali, posisi keuangan, performa keuangan, opini, temuan, LKPD.*

Diterima: 25 Januari 2016; Direvisi: 1 Maret 2016; Disetujui: 30 Maret 2016

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan pada sektor pemerintah berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya pada perundang-undangan. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercantum dalam SAP menjelaskan bahwa seharusnya laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Seperti hal pelaporan keuangan pada perusahaan publik, pelaporan keuangan pemerintah juga harus dipublikasikan secara tepat waktu. Penyampaian dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut disampaikan atau dipublikasikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan para pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan (Romney dan Steinbart, 2009:28).

Penyelesaian pemeriksaan LKPD tertunda salah satunya adalah akibat dari pemerintah daerah yang terlambat melaporkan LKPD ke BPK. Merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) pada tahun 2011 sebanyak 158 LKPD (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang diselesaikan pemeriksaan oleh BPK pada semester II. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 94 LKPD dan pada tahun 2013 ada sekitar 108 LKPD yang diselesaikan pemeriksaannya pada semester II. Pada 2014 terdapat 68 jumlah LKPD yang diperiksa BPK pada semester II. Dalam sektor pemerintahan, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menerangkan bahwa paling lambat tiga bulansetelah

tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya dua bulansetelah laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut kepada DPRD sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD *audited* adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir. Sehingga LKPD yang diselesaikan oleh BPK terselesaikan pada Semester II (Juni s.d Desember) berarti LKPD tersebut telah mengalami keterlambatan (Lase dan Sutaryo, 2014).

Informasi keuangan daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 31 Agustus tahun berjalan. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah, maka akan diterbitkan peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan. Jika Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis tidak menyampaikan informasi maka Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Penjelasan ini sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 tahun 2005.

Teori Keagenan

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agenberlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa principal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko.

Menurut Lane (2003a) dalam Syukriy Abdullah (2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 2000). Hal senada

dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, dan *adverse selection* (Abdullah, 2006).

Teori Lokasi

Teori lokasi industri dan teori pusat pertumbuhan memiliki peranan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana penempatan lokasi industri yang tepat dapat memberikan banyak jalan, diantaranya industri yang didirikan dilokasi yang tepat, mampu menyerap tenaga kerja yang ada disekitar lokasi industri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu daerah yang menjadi lokasi industri secara otomatis akan mengalami kenaikan pendapatan daerah. Sehingga memungkinkan perekonomian didaerah lokasi industri mengalami peningkatan.

Teori Kurva Belajar

T.P. Wright memperkenalkan teori kurva belajar (*learning curve theory*) pada saat meneliti perusahaan pesawat terbang. Wright menyatakan bahwa setiap kali kuantitas output kumulatif menjadi dua kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar persentase tertentu (Barber, 2011). Ketika suatu proses atas produk baru dimulai, kinerja seorang pekerja tidak pada tingkat terbaiknya dan fenomena pembelajaran atau proses dimana seorang memperoleh keahlian, pengetahuan dan kemampuan pun dimulai. Pekerja akan membutuhkan waktu yang lebih lama pada saat pertama kali bekerja daripada pekerjaan yang dilakukan kedua atau ketiga kalinya. Dengan pengulangan tersebut maka waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat dan akan menuju ke arah perbaikan. Fenomena inilah yang disebut dengan kurva pembelajaran (*learning curve*).

Teori Kepatuhan

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum

karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative-commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan amanah rakyat memiliki keharusan untuk melaporkan pertanggung jawabannya atas keuangan dan operasional daerah tersebut selama satu tahun buku. Hal ini berarti pemerintah mempunyai keterikatan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan daerah pada bantuan pemerintah pusat (*ratio grants to total operating revenue*) seiring dengan cita-cita demokrasi nasional dan proses percepatan pembangunan maka muncul suatu yang dinamakan dengan otonomi daerah. Ini berarti bahwa suatu daerah memiliki sifat yang otonom. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Sumber pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan asli daerah, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi;
2. Dana perimbangan, yang bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antarpemerintah daerah;
3. Pendapatan lain-lain yang memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah.

Bantuan (*grants*) menjadi sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah daerah di banyak negara (Bird, 2000; Humes IV, 1991; Wilson dan Game, 1994; Shah, 1994). Istilah lain dari *grants* yang juga seringkali dipergunakan adalah *subsidies* atau *subventions*. Terdapat tiga alasan utama dari penggunaan jenis bantuan ini (Humes IV, 1991: 239) yakni: menambah sumber pendapatan daerah,

memenuhi kebutuhan yang berlebihan pendapatan yang terbatas dari area tertentu, dan meningkatkan program tertentu serta menyelipkan kontrol terhadapnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan pada sektor pemerintah berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal penyerahan ke Bapepam-LK (Rachmawati, 2008:5). Laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih berguna dari pada yang tidak tepat waktu. Setelah informasi yang relevan tersedia lebih cepat, mampu meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu dapat mengurangi informasi dari kegunaannya (Kieso *et.al*, 2011).

Terdapat tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya (Dyer dan Mc Hugh, 1975): (1) *Preliminary lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa. (2) *Auditor's report lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani. (3) *Total lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Audit Sektor Publik

Undang-undang No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan pemeriksaan

(audit) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang- Undang di bidang Keuangan Negara yaitu: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti halnya pada auditor swasta, BPK RI juga bekerja berdasarkan standar audit Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang berlaku sejak 7 Maret 2007.

Keterkaitan Antar Variabel

I. Pemerintah daerah dan politik

a. Kemandirian daerah terhadap bantuan pemerintah

Pemerintah masih sangat mengandalkan pada dana berimbang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan yang telah dikabarkan oleh BPK bahwa 90% pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota masih bergantung pada dana perimbangan ini. Pemerintah daerah mengalokasikan dana perimbangan ini untuk tujuan operasional dan investasi. Cohen dan Laventis (2012) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk untuk melaporkan keuangan daerah secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan terdapat sanksi akan keterlambatan pelaporan keuangan daerah kepada pemerintah pusat yaitu berupa penundaan pencairan dana tahun anggaran berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diberikan pemerintah maka pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dalam melaporkan LKPD.

H1: Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana perimbangan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

b. Lokasi Daerah

Menurut Nurhadi (2007), minimnya pembangunan pada suatu daerah akan berdampak pada rendahnya aksesibilitas daerah tersebut. Ketika suatu daerah memiliki aksesibilitas yang rendah sebagai akibatnya daerah tersebut akan sulit untuk memperoleh faktor produksi, akses transportasi dan telekomunikasi, serta fasilitas pendidikan berupa universitas-universitas yang mempunyai reputasi salah satunya dalam menghasilkan tenaga akuntan yang cakap dalam pengelolaan keuangan. Pemerataan pembangunan daerah yang belum sempurna tersebut juga tentu menjadi salah satu faktor terhambatnya pelaporan keuangan daerah terutama dari daerah-daerah terpencil dimana mereka kesulitan mengakses informasi ataupun karena faktor minimnya sumber daya manusia yang ada.

H2: Jarak lokasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah

c. Keterpilihan kembali kepala daerah (*incumbent*)

Kepala daerah bertahan (*incumbent*) yang terpilih kembali diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan kepala daerah yang baru terpilih. Menurut Cohen dan Leventis (2013), kepala pemerintah daerah yang telah berpengalaman memimpin suatu daerah selama lebih dari empat tahun, maka dia akan cukup akrab dengan standar dan prosedur akuntansi serta langkah-langkah persiapan yang diperlukan untuk memfasilitasi prosedur audit. Dengan pengalaman dan pengetahuan tersebut, kepala daerah bertahan diharapkan dapat membuat kebijakan yang mengarah pada perbaikan dalam prosedur akuntansi. Sedangkan jika terpilihnya pemimpin daerah yang baru, ia cenderung akan menginvestigasi masalah keuangan daerah dalam rangka mengungkapkan isu-isu tersembunyi dalam laporan keuangan, dan akan merekrut auditor untuk menyelesaikannya. Antisipasi ini dikhawatirkan akan memperpanjang masa persiapan pelaporan keuangan daerah.

H3: keterpilihan kembali kepala daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

2. Kandungan Laporan Keuangan dan Kmpetensi Manajerial

a. Posisi dan Performa Keuangan

Rasio-rasio keuangan akan mencerminkan ukuran kebaikan ataupun keburukan dari konten laporan keuangan tersebut. Hal ini mengindikasikan konten laporan yang baik (kabar baik) akan dilaporkan secara tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, manajemen memberikan sinyal positif secepatnya ataupun secara tepat waktu, jika pelaporan mengalami keterlambatan maka dapat diindikasikan bahwa hal tersebut mengandung sinyal yang buruk. Selain itu, ketepatan waktu pelaporan keuangan juga mengindikasikan kompetensi manajerial yang baik. Staff manajerial yang kompeten di perkirakan mempunyai pengendalian internal yang baik dan memiliki catatan dan fungsi yang lebih baik.

H4: Posisi laporan keuangan yang baik berhubungan positif dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

H5: Performa laporan keuangan yang baik berhubungan positif dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

d. Temuan

Komunikasi antara auditee dan auditor menjadi lebih intens ketika terdapat permasalahan akuntansi yang bersifat material (Cohen dan Leventis, 2013). Hal ini berarti semakin banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi antara tim audit pemerintah (BPK) dengan pihak penanggung jawab audit pemerintah daerah sebelum temuan tersebut dilaporkan dalam laporan hasil audit.

H6: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

e. Opini

Menurut McLelland & Giroux, opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) merupakan sebuah pertanda buruk bagi pengguna laporan keuangan. Opini yang diberikan BPK berupa opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar ataupun tidak mengemukakan pendapat dapat dianggap sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

H7: Opini WTP laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu ketepatan pelaporan keuangan daerah. Variabel independen dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu (1) faktor pemerintah daerah dan politik yang diukur melalui tingkat kemandirian daerah, jarak lokasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta keterpilihan kembali kepala daerah tahun sebelumnya. (2) faktor kompetensi manajerial yang diukur melalui posisi dan performa keuangan daerah, temuan audit, opini audit. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) sampai dengan 2013 yaitu sejumlah 548 pemerintah daerah.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi logistik dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \varepsilon$$

Di mana : Y adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah; β_0 adalah konstanta; X_1 adalah kemandirian daerah; X_2 adalah lokasi pemerintah daerah; X_3 adalah keterpilihan kembali kepala daerah; X_4 adalah posisi keuangan daerah; X_5 adalah performa keuangan daerah; X_6 adalah temuan audit; X_7 adalah opini audit; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ adalah koefisien regresi; ε adalah standar error.

Variabel dependen yang digunakan adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia yang diukur menggunakan skala *dummy* dimana angka 1 mewakili ketepatan waktu dan 0 mewakili ketidaktepatan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku ketepatan waktu pelaporan dilihat dari tanggal laporan keuangan audit pemerintah daerah dikeluarkan oleh BPK yaitu maksimal 3 bulan setelah tanggal tutup buku.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah 1) kemandirian daerah yang diukur dengan perbandingan antara jumlah realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan total realisasi pendapatan daerah. 2) Lokasi pemerintah daerah menggunakan skala *dummy* dimana angka 1 mewakili lokasi pemerintah daerah yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat dan angka 0 jika lainnya. 3) Keterpilihan kembali kepala daerah yang diukur menggunakan skala *dummy* dimana angka 1 mewakili kepala daerah yang menjabat selama 2 tahun atau lebih secara berturut-turut ketika penelitian berlangsung dan angka 0 mewakili kepala daerah yang menjabat selama kurang dari 2 tahun selama penelitian berlangsung. 4) Posisi keuangan daerah diukur menggunakan skala rasio dengan perhitungan perbandingan antara total aset dengan total pendapat. 5) performa keuangan daerah juga menggunakan skala rasio dengan perhitungan perbandingan antara perubahan aset bersih dengan total aset. 6) Temuan auditor diukur menggunakan skala rasio dengan menghitung jumlah temuan audit suatu daerah, jumlah temuan auditor ini dapat diperoleh dari Indeks Hasil Pemeriksaan BPK. 7) Opini audit diukur menggunakan skala *dummy* dengan angka 1 mewakili entitas yang menerima WTP atau WTP-DPP dan angka 0 jika entitas menerima opini selain WTP atau WTP-DPP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah seluruh Indonesia baik itu Provinsi, Kabupaten ataupun Kota tahun anggaran 2013. Total jumlah seluruh daerah otonom mengacu pada data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya sampel yang dipilih mengacu pada pemerintah daerah yang mengeluarkan laporan keuangan didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK. Jumlah pemerintah daerah berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebanyak 415 kabupaten, 93 kota dan 34 provinsi atau setara dengan total 542 daerah. Sedangkan laporan keuangan audit daerah tahun anggaran 2013 berdasarkan IHPS BPK menyebutkan jumlah kabupaten sebanyak 399, kota sebanyak 92 dan provinsi sebanyak 33. Timbulnya perbedaan ini dikarenakan hanya 524 daerah yang telah menyusun LKPD Tahun 2013.

Hasil Uji Analisis Data Penelitian

a. Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2 Log Likelihood* (-2LL) pada awal (*Block Number=0*) dengan nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL) pada akhir (*Block Number=1*). Nilai -2LL awal adalah sebesar 668,900. Setelah dimasukkan ketujuh variabel independen, maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan menjadi 520,689. Penurunan *Likelihood* (-2LL) sebesar 148,211 ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

Tabel 1. Menilai Keseluruhan Model

Iteration History ^{a,b,c,d}		Coefficients								
Iteration	-2 Log likelihood	Constant	GRANTS	LOCATE	INCUMBENT	POSITION	PERFORM	FINDINGS	OPINION	
1	532,473	,335	-,012	,680	,270	-,026	-,223	-,074	,786	
2	521,140	,381	-,018	,843	,373	-,030	-,390	-,098	1,160	
3	520,690	,413	-,020	,859	,392	-,030	-,440	-,103	1,252	
4	520,689	,417	-,020	,859	,393	-,030	-,442	-,103	1,256	
5	520,689	,417	-,020	,859	,393	-,030	-,442	-,103	1,256	

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 668,900

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : Output SPSS

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R. Square*)

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,342 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 34,2% sedangkan sisanya sebesar 65,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 2. Koefisien Determinasi

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	520,689 ^a	,246	,342

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

c. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 11,591 dengan signifikansi (p) sebesar 0,170. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya.

**Tabel 3. Kelayakan Model Regresi
Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	11,591	8	,170

Sumber: output SPSS

d. Hasil Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah

**Tabel 4
Matriks Klasifikasi**

Observed		Predicted		Percentage Correct
		TIMELINESS 0	TIMELINESS 1	
Step 1	TIMELINESS 0	85	91	48,3
	TIMELINESS 1	31	317	91,1
Overall Percentage				76,7

a. The cut value is ,500

Sumber: output SPSS

Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah adalah sebesar 91,1%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan, terdapat sebanyak 477 pemerintah daerah yang diprediksi akan melakukan pelaporan keuangan secara tepat waktu dari total 524 pemerintah daerah di Indonesia. Kekuatan prediksi model pemerintah daerah yang melaporkan keuangan daerah tidak tepat waktu adalah sebesar 48,3% yang berarti bahwa dengan model regresi yang digunakan ada sebanyak 253 pemerintah daerah yang diprediksi tidak tepat waktu dalam melaporkan keuangan daerah dari total 524 pemerintah daerah di Indonesia.

e. Hasil Uji Regresi Logistik

Model regresi logistik yang terbentuk disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

Variables in the Equation		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	GRANTS	-,020	,006	10,220	1	,001	,980
	LOCATE	,859	,235	13,324	1	,000	2,361
	INCUMBNT	,393	,237	2,759	1	,097	1,482
	POSITION	-,030	,024	1,621	1	,203	,970
	PERFORM	-,442	,707	,391	1	,532	,643
	FINDINGS	-,103	,021	24,850	1	,000	,902
	OPINION	1,256	,284	19,618	1	,000	3,511
	Constant	,417	,320	1,694	1	,193	1,517

a. Variable(s) entered on step 1: GRANTS, LOCATE, INCUMBNT, POSITION, PERFORM, FINDINGS, OPINION.

Sumber: output SPSS

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi menghasilkan model berikut ini:

$$Timeliness = 0,417 - 0,20 GRANTS + 0,859 LOCATE + 0,393 INCUMBNT - 0,30 POSITION - 0,442 PERFORM - 1,03 FINDINGS + 1,256 OPINION$$

Berdasarkan pengujian regresi logistik (*logistic regression*) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, hasil uji hipotesis H1 menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin banyak dana perimbangan yang diterima daerah maka daerah tersebut akan semakin tinggi tingkat ketergantungannya dengan pemerintah pusat dan mereka akan semakin mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat termasuk ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

Variabel lokasi daerah (*LOCATE*) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,859, hal ini membuktikan bahwa hipotesis ke-2 berhasil didukung yang berarti bahwa semakin jauh lokasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (pemerintah daerah yang berada di wilayah selain Indonesia bagian Barat) maka daerah akan semakin berpeluang untuk melakukan keterlambatan dalam pelaporan keuangan daerah. Variabel keterpilihan kembali (*INCUMBNT*) memiliki koefisien regresi sebesar 0,393. Hal ini menunjukkan hipotesis ke-3 ditolak yang

berarti bahwa keterpilihan kembali kepala daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

Variabel posisi keuangan (POSITION) dan performa keuangan (PERFORM) menunjukkan bahwa posisi keuangan dan performa keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Variabel temuan audit (FINDINGS) memiliki koefisien regresi sebesar 1,03 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti banyaknya temuan dalam audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia, semakin banyak jumlah temuan yang ditemukan maka akan memperpanjang waktu audit. Hal ini menunjukkan bahwa variabel opini berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Opini daerah yang diberikan oleh BPK selain dari WTP dan WTP-DPP yaitu WDP, TW, dan TMP akan memperpanjang waktu dari penerbitan laporan keuangan audit karena sebelum mengeluarkan opini akan terjadi komunikasi-komunikasi terkait dengan temuan dan opini antara auditor dan klien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji regresi logistik (*logistic regression*) menunjukkan bahwa faktor kemandirian daerah, lokasi daerah, opini audit dan temuan audit pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (*logistic regression*) menunjukkan bahwa faktor keterpilihan kembali kepala daerah, posisi dan performa keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia.

PUSTAKA ACUAN

- Abdurachmat, Idris dan Maryani, E.1997. *Geografi Ekonomi*. Institut Kerguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung.
- Adi, P. H. (2006). *Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah*. Dalam Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.

- Almilia, Luciana Spica dan Vieka Devi. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*". Simposium Nasional Manajemen.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2007. *Accounting Theory 5th Edition*, Jakarta: Salemba Empat.
- Cagle, C. S., Flesher, D. L., & Pridgen, A. B. 2014. *Audit Report Timeliness Of United States Local Governments: An Investigation Of Entities Exceeding Reporting Deadlines*. Working Paper
- Cagle, C., Pridgen, A., 2012. *Audit Quality in County Governments: Evidence from Audit Findings*. Working Paper.
- Carslaw, C., Mason, R., Mills, J., 2007. *Audit Timeliness of School District Audits*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 19
- Cohen, S., & Leventis, S. 2013. Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay. In *Accounting Forum* Vol. 37. Elsevier.
- Dinas Pendapatan provinsi Jawa Barat. 2014. *Melepas Ketergantungan Dana Pusat*. <http://dispenda.jabarprov.go.id/2014/08/07/melepas-ketergantungan-dana-pusat/>. diakses tanggal 20 Maret 2015
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dwyer, P. D., & Wilson, E. R. 1989. *An empirical investigation of factors affecting the timeliness of reporting by municipalities*. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Dyer, J. C. And McHugh, A. J. 1975. *The Timeliness of The Australian Annual Report*". *Journal of Accounting Research* 13.
- Evans, J., Patton, J., 1987. *Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting*. *Journal of Accounting Research* 25 (Supplement), 130-158.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Johnson, L. E., 1998. *Further evidence on the determinants of local government audit delay*. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management..
- Johnson, L., Davies, S., Freeman, R., 2002. *The Effect of Seasonal Variations in Auditor Workload on Local Government Audit Fees and Audit Delay*. Journal of Accounting and Public Policy.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. *Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics.3.
- Lane, Jan-Erik. 2003b. *Relevance of the principal-agent framework to public policy and implementation*. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper.
- Lase, Yediel dan Sutaryo. 2014. *Pengaruh Karakteristik Auditor terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. Simposium Nasional Akuntansi XVII
- Kuncoro, H. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Maarif, M.S, Tanjung, H. 2003. *Teknik-Teknik Kuantitatif Untuk Manajemen*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Masli, L. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Jakarta: STIE STAN IM.
- McLelland, A., Giroux, G., 2000. *An Empirical Analysis of Auditor Report Timing by Large Municipalities*. Journal of Accounting and Public Policy 19.
- Mead, D. 2011. *GASB Research Brief: The Timeliness of Financial Reporting by State and Local Governments Compared with the Needs of Users*. Norwalk, CT: Governmental Accounting Standards Board.
- Moe, T. M. 1984. *The new economics of organization*. American Journal of Political Science 28.
- Mohamad, Marziana, Wan Mohammad Taufik, Mohamad Sakarnor Deris. 2012. *Audit Delay in Local Authorities: An Exploratory Study in Kedah, Perak and*

- Kelantan. International Conference on Economics, Business Innovation vol 32. Singapore : IACSIT Press
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Nuryadin, D., Sodik, J., & Iskandar, D. 2000. *Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia*.
- Payne, J., Jensen, K., 2002. *An Examination of Municipal Audit Delay*. Journal of Accounting and Public Policy 21.
- Pramusinto, Agus (ed). 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Romney, Marshall B dan Paul Jhon Steinbart. 2009. *Accounting Information Systems: International Edition, 11th Edition*, USA: PearsonPrentice Hall.
- Respati, Novita Weningtyas. 2004. *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan*. Jurnal Maksi No 4.
- Scott William. R. 2012. *Financial Accounting Theory 6th Edition*, Canada: Prentice Hall Canada Inc.
- Suharli, Michell. 2009. *Pelaporan Keuangan, Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi*. Jakarta: Grasindo.